



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP NUSA TENGGARA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 36 Rembiga Mataram 83124
Telepon (0370)647862; Faksimile (0370)647883
Situs www.pajak.go.id; Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021)1500200
Email pengaduan@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 003/ 2018
Tanggal : 26 Maret 2018

Jaga Integritas, Kanwil Nusra Canangkan Zona Integritas

Salah satu target Program Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit-unit kerja di pemerintahan, yaitu melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kanwil DJP Nusa Tenggara berkomitmen untuk ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, ditandai dengan pencanangan pembangunan zona integritas pada hari ini, Senin 26 Maret 2018 bertempat di aula Rinjani Kanwil DJP Nusa Tenggara. Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Suparno menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas disaksikan oleh para Kepala Kantor dan Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Pulau Lombok serta *stakeholder*, terdiri dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komandan Korem 162/Wira Bhakti, narasumber dari Saber Pungli Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perwakilan Wajib Pajak.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kanwil DJP Nusa Tenggara dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan maksud dan tujuan agar semua pihak ikut mengawasi, mengawal dan berperan dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Kantor

ttd

Suparno
NIP 19680520 199503 1 003